

MEMBACA INOVASI DAERAH DARI KASUS DAS DOSAN, SIAK¹

Khairul Anwar, Syafri Harto, Isril, Wan Asrida²
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan inovasi di daerah aliran sungai (DAS) dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan mengambil contoh kasus Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat (P3KS) di kampung Dosan Kabupaten Siak 2007-2015 Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan itu adalah menggabungkan pendekatan Modern Political Economy dan governability. Hasil studi ini menemukan bahwa pertama,; inovasi Daerah ditentukan oleh kapasitas manajerial dan politik kepala daerah Kedua, Lingkungan politik, kepemimpinan dan kemampuan membangun jaringan kerjasama adalah faktor kunci inovasi Daerah; Ketiga, pentingnya mendorong pengembangan nilai-nilai harmoni bukan konflik di tengah-tengah masyarakat lokal DAS

Key words; inovasi kebijakan, legitimasi, visi, dan keberanian

PENDAHULUAN

Dosan adalah sebuah kampung³ yang terletak di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak⁴. Secara historis kampung ini sudah ada sejak masa Kerajaan Siak Sri Indrapura atau masa penjajahan kolonial Belanda. Nama Dosan berasal dari Siak Kiri yaitu Sungai Dosan. Pada awalnya nama kampung yang dipakai adalah Tanjung Medan, dalam perkembangannya nama tersebut berganti nama Dosan⁵. Desa ini memiliki luas sekitar 11.250 Ha dan berbatasan dengan U tara Pelabuhan Buton.

¹ Artikel ini sengaja dikembangkan dari hasil penelitian “*Political Model of Conflict Based on palm Plantation near to Riverside area: Dosan Siak case, 2009-2014* dalam prosiding. Seminar Antar bangsa ke-8 Ekologi manusia dan Perubahan Persekitaran, Langkawi, Kedah Malaysia, 21-22 September 2015. Artikel ini dibuat terkait penelitian skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) yang sedang berlangsung hingga Desember 2015.

² Staf pengajar Fisip Universitas Riau- Jurusan Ilmu pemerintahan dan Ilmu Hubungan Internasional- 2015

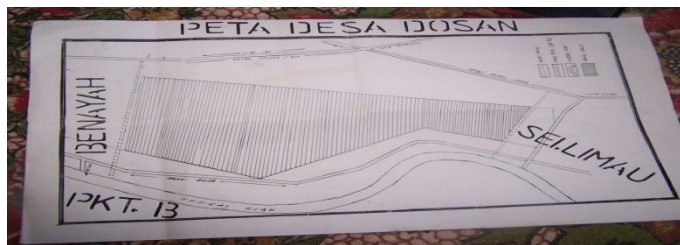
³ Konsep Kampung dipakai menggantikan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan nama Desa menjadi Kampung..

⁴ Kabupaten Siak terbentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, yang peresmianya dilakukan pada tanggal 12 Oktober 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (ad-interim) Feisal Tanjung, sekaligus Pelantikan Pejabat Bupati Siak H. Tengku Rafian dengan SK Mendagri No. 131.24-1129 tanggal, 8 Oktober 1999.

⁵ Riko, Program Kebun Untuk Masyarakat, 2005

Sebelah selatan dengan Bunga Raya, dan Barat berbatasan dengan Benayah Timur. Dewasa ini jumlah total penduduknya adalah 1.012 jiwa. Sekitar 75 persen dari penduduk usia kerja bekerja sebagai petani pekebun sawit⁶. Dengan tingkat Pendidikan masyarakat di kampung Dosan masih tergolong rendah, dimana rata-rata masyarakat hanya mengecap pendidikan SD. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat desa mulai dari Kepala Desa, SekDes hingga Ketua BPD-nya hanya mengecap pendidikan di Sekolah Dasar. Untuk masa sekarang anak-anak mereka mulai ada yang bersekolah sampai SLTA dan tercatat ada 2 (dua) orang yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan itu hanya terbatas untuk beberapa keluarga saja.

Gambar 1



Sumber: Riko, 2007:

Sumber daya utama di kampung ini pada awalnya, bergantung pada potensi hasil alam dari sungai Siak berupa hasil tangkapan ikan. Sumber daya tambahan lainnya berupa hasil bertani dan berkebun dengan cara membuka lahan di sekitar hutan di wilayah kampung. Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat kampung Dosan kebanyakan adalah menoreh Karet, buruh tani, dan bangunan. Namun kebanyakan lahan perkebunan masyarakat tidak produktif. Sementara untuk mengandalkan hasil tangkapan sebagai nelayan saat ini kurang menjamin, hal ini disebabkan menurunnya hasil tangkapan dari sungai Siak. Pada hal dinamika sector ekonomi-perdagangan masyarakat kampung sangat ditentukan oleh tingkat produksi perikanan yang ada. Jika musim ikan air sungai pasang dan tidak tercemar, pendapatan masyarakat membaik dan kondisi ini membantu menggerakkan perekonomian rumah tangga masyarakat kampung. Dalam kondisi demikian, sejak tahun 2003 muncul gagasan Pemerintah Daerah kabupaten Siak mengembangkan pola perkebunan kelapa sawit rakyat melalui Surat keputusan (SK) Bupati Siak Nomor 171 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang pedoman penetapan calon petani (CP) dan calon lahan (CL) program pengembangan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Siak tahun 2003. Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan untuk

⁶ Lihat Profil Kecamatan Pusako tahun 2012. disebutkan bahwa kondisi lahan kampung Dosan dikategorikan subur dan banyak digunakan untuk kebun kelapa sawit

mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tempatan dengan cara membuat program pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 hektar di kampung Sungai Limau, Dosan, Benayah, Pebaadaran, Dusun Pusaka, Perincit di kecamatan Bunga raya dan kampung teluk Mesjid di Kecamatan Sungai Apit.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut, yaitu: seperti apa proses Inovasi yang dilakukan Pemda kabupaten Siak bidang perkebunan kelapa sawit di Kampung Dosan DAS Siak? Pertanyaan pokok penelitian itu dapat dirumuskan lebih specific adalah sebagai berikut; (1) Faktor apa saja yang mewarnai terjadinya proses kebijakan inovasi tersebut?, (2) Siapa saja aktor yang terlibat dalam pproses inovasi tersebut, dan (3) apa saja bentuk-bentuk inovasi kebijakan dalam bidang perkebunan kelapa sawit di kampung Dosan? Penelitian ini bertujuan mndeskripsikan proses inovasi daerah yang dilakukan Pemerintah daerah kabupaten Siak. melalui penelaahan terhadap kasus inovasi perkebunan sawit di kampung Dosan dengan cara menggunakan konsep *governability* dan *modern political economy*.

Dalam penelitian ini, inovasi yang terjadi di Kabupaten Siak dijadikan fokus kajian karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, kabupaten Siak tercatat sebagai Daerah paling dinamik dalam hal inovasi Daerah di Riau. Hal ini ditandai dengan perolehan prestasi dan penghargaan baik di tingkat nasional, regional maupun provinsi. Selama empat tahun pemda ini memperoleh pengakuan berupa penghargaan sebanyak 129 buah, yang diberikan oleh lembaga pemerintah tingkat nasional, regional, lokal serta lembaga masyarakat sipil. Sejalan dengan itu, wilayah Kabupaten Siak sebagai daerah berbasis DAS yang terpanjang dan terpadat di Riau menjadi salah satu sasaran utama penerapan kebijakan kelapa sawit yang paling intensif dan ekstensif. Sejalan dengan itu, (Riau Pos, 14 Oktober 2015). Capaian prestasi ini merupakan bentuk operasionalisasi *governability*.

Kedua, Desa Dosan dijadikan areal penelitian karena wilayah desa ini berada di DAS Siak yang paling dinamik. Sebagai desa tradisional yang dekat pusat pemerintahan, menjadi pintu masuk Riau setelah Batam masuk provinsi Kepulauan Riau. Kemudian desa ini pusat pertambangan minyak di DAS Siak, industri Buton dan jauh sebelumnya telah menjadi pusat perubahan masyarakat di sekitar DAS Siak. Semula, masyarakat desa ini bermata pencaharian nelayan. Perubahan lingkungan DAS yang kurang menguntungkan masyarakat setempat (misalnya pencemaran), membuat penduduk desa ini beralih menjadi petani pekebun. Sejak pembangunan perkebunan dimulai 2004, konflik antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan Pemda, dan perusahaan, Perusahaan dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintahan Daerah kabupaten Siak. Pengelolaan konflik ini bentuk nyata kapasitas pemerintahan daerah kabupaten Siak dalam menghasilkan *political goods*.

Ketiga, sejak 2005 P emkab Siak membuat program terobosan di bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit di tingkat kabupaten. Program inovasi ini menggagas ide baru pembangunan perkebunan dalam hal penyediaan lahan, anggaran dan strategi pemasaran. Dalam proses itu, diharapkan adanya distribusi kepemilikan, peningkatan kapasitas produksi perkebunan, ekonomi rumah tangga dan akses partisipasi masyarakat kampung dalam pengambilan keputusan. Ketiga hal tersebut diatas menunjukkan pentingnya menunjukkan “cerita sukses” daerah dalam konteks nasional. Secara politik, informasi studi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memahami kebutuhan analisis penelitian ini, data yang diperlukan meliputi; kondisi perpolitikan dan pemerintahan lokal di kampung Dosan sesudah OTDA, sejarah perkebunan di Siak dan Dosan, pilihan-pilihan kebijakan perkebunan, lembaga-lembaga masyarakat sipil. Sumber data baik data skunder maupun primer. Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, baik dicetak maupun elektronik. Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh lokal atau memanfaatkan hasil wawancara yang dilakukan media cetak terhadap pelaku sejarah dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di kampung Dosan.

Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan di kampung Dosan. Observasi ini meliputi, seperti rapat terbuka, pertemuan, demonstrasi, kunjungan kelokasi perkebunan Tujuan observasi ini adalah untuk memotret kondisi lingkungan politik yang relevan dan memuat karakteristik kasus (K. Yin, 1994:113). Dalam observasi ini data diperoleh berupa: foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *model identifikasi* pendekatan *Modrn Political Economy (MPE) Jefry Frieden (2000)* dan konsep *governability* ⁷(2007) MPE memuat empat langkah: *pertama*, merumuskan atau mengidentifikasi aktor-aktor yang terkait proses inovasi kebijakan dalam wacana dan pembangunan kelapa sawit di DAS Dosan, menentukan apa yang menjadi tujuan, kepentingan, dan bentuk inovasi. Aktor-aktor tersebut baik yang berasal dari kalangan birokrasi seperti Bupati, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, penghulu, ketua BPD dan para petani pekebun..

⁷ Konsep *Governability* mengacu Pratikno dan Cornelis Lay, dalam Muhtar Haboddin, 2015, hal.50

Kedua, merumuskan preferensi masing-masing aktor mengenai pilihan inovasi kebijakan perkebunan kelapa sawit di Dosan. Data yang dianalisis meliputi penerapan pola; Kemitraan Dalam memilih pola-pola perkebunan tersebut para aktor diasumsikan menghadapi pertimbangan-pertimbangan paling tidak empat isu utama, yaitu; pertanahan, lapangan kerja, teknologi, dan lingkungan. Dalam menganalisis data tersebut para aktor digambarkan sebagai pihak yang suka pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya. Sehingga dari analisis ini diketahui apa yang menjadi preferensi inovasi.

Ketiga, mengidentifikasi bagaimana para aktor bekerjasama dalam mencapai tujuan inovasi di bidang kelapa sawit di kampung Dosan. Selain itu, akan di analisis juga koalisi yang dibangun kelompok baik yang “mendukung” atau “menolak” inovasi kebijakan kelapa sawit yang berasal dari kalangan pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. Dalam analisis ini akan diperoleh pola-pola. Arah konflik yang terjadi diantara para aktor.

Keempat, mengidentifikasi bagaimana para aktor lokal berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan inovasi daerah. Dari analisis ini diharapkan akan diperoleh pola interaksi aktor lokal dalam kaitan kebijakan perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis melalui kerangka berfikir *governability*. dan *modern political economy (MPE)*. Analisis ini memusatkan perhatian kepada konsep “*political good*” sebagai fungsi dasar pemerintahan dewasa ini. Hubungan masing-masing sub-politik aktor inilah yang akan merangkai analisis inovasi daerah di DAS Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kapasitas Teknokratik

Di kabupaten Siak, perkebunan merupakan sektor utama yang mempengaruhi pola hidup masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial budaya⁸. Untuk itu, pemda kabupaten Siak melakukan langkah terobosan tujuannya tidak hanya meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat tetapi juga sebagai sarana

⁸ Lihat hasil wawancara wartawan Azam dengan Bupati Siak Laporan utama Azam No.839, April 2015 disebutkan bahwa ..masyarakat kami banyak petani khususnya kelapa sawit dan tanaman pangan, juga karet, kita sediakan 15 ribu hektar kebun sawit yang harus di replanting. Tahun lalu kita telah melakukan 1.200 hektar dan masih tersisa 13.000 hektar lagi. Pemkab Siak menyediakan sekitar 15.000 hektar lahan sawit.

pengorganisasian masyarakat tempatan menghadapi perubahan social yang berlangsung⁹.

Pada awalnya, mata pencaharian masyarakat Desa Dosan mengandalkan hasil tangkapan sebagai nelayan. Untuk masa sekarang sangat kurang menjamin, hal ini disebabkan menurunnya hasil tangkapan dari sungai Siak. Seperti penuturan beberapa informan bahwa untuk *melaut*¹⁰ kondisinya hasil yang diperoleh sangat memprihatinkan, terkadang mereka pulang dari *melaut* hanya memperoleh udang/ikan satu- dua ekor atau tidak memperoleh hasil sama sekali. Sedangkan penghasilan masyarakat secara umum cenderung hanya cukup untuk makan sehari-hari, sehingga untuk biaya pendidikan dan kesehatan sangat kurang mendukung/memadai. Hal ini mendorong mereka mencari penghasilan tambahan menjadi buruh bangunan dan berkebun.

Pekerjaan tambahan masyarakat dosan \kebanyakan adalah menoreh Karet dan bekerja serabutan (*Ramas*) yaitu buruh tani, hal ini didukung kebiasaan nenek-moyang mereka bertani –ladang berpindah sehingga lahan mereka kebanyakan kurang produktif. Untuk masyarakat yang berkebun karet dengan luas kebun rata-rata 0,5-2 Ha. Perekonomian rumah tangga masyarakat dengan sendirinya beragam sesuai dengan hasil dari luas kebunnya. Kondisi ekonomi ini sangat ditentukan oleh musim. Pada waktu tidak musim penghujan untuk 1 ha kebun karet mereka memperoleh sekitar Rp.125.000,-s/d Rp. 250.000,- seminggu dengan perolehan getah atau karet potong 25-35 Kg. Jumlah pendapatan ini jika digunakan untuk keperluan pokok rumah tangga setiap minggu seringkali kekurangan, apalagi bagi keluarga yang memiliki tanggungan yang cukup besar. Kondisi inilah antara lain mendorong warga kampung Dosan mencari penghasilan tambahan. Pada waktu, orientasi ekonomi warga ke sungai Siak, pekerjaan tambahannya menjadi buruh bangunan atau berkebun berpindah. Ketika orientasi ekonomi warga kedarat, pekerjaan tambahannya buruh bangunan, ke laut menangkap ikan dan ngojek. Kondisi empiric kampung inilah tepat digambarkan sebagai perubahan social. Perubahan social ini terus terjadi, bahkan beberapa segi kehidupan berjalan cepat tidak terkendali. Perubahan social itu bukan hanya bagian dari gerak dan kesadaran untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga sebagai imbas dari proses ekspansi dan intervensi pelbagai bentuk kapitalisasi yang hadir bersama arus globalisasi (Usman, 2015:V).

Kapitalisasi di wilayah kampung Dosan sudah berlangsung lama dan menimbulkan

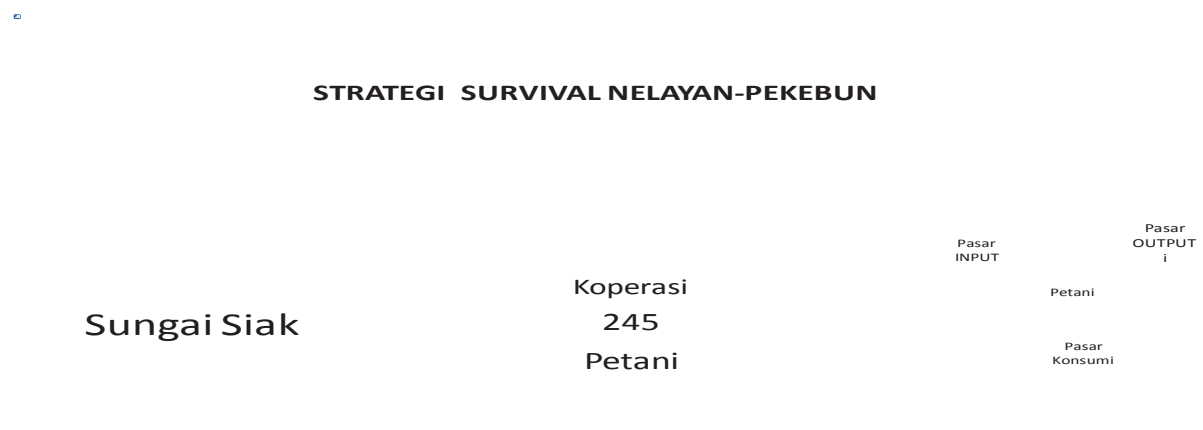
⁹ Luas tanaman perkebunan tahun 2011: Kelapa 181,35 ha, Karet 863,10 ha, Kopi 130,65, Sagu, 3,457,50 ha, Kakao 56,50 ha, Pinang 201,32 ha, Sawit 232.858,11 ha. Berdasarkan besar potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan sektor perkebunan sebagai salah satu *core bussiness* dan *leading sektor*, selain sektor pariwisata dan industri pengolahan. Sektor pertanian juga merupakan sektor andalan yang mendukung peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Siak.

¹⁰ Isitilah *melaut* dimaksudkan masyarakat tempatan sebagai identifikasi diri terhadap upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan sumberdaya alam sungai Siak.

gesekan-gesekan dalam masyarakat. Karena di sekitar wilayah dosan terdapat beberapa perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang memiliki Hak Penguasaan HTI. Wilayah operasional di sekitar hutan kampung hingga batas sebelah utara yang berdekatan jalan BOB hingga daerah Buton dan sebelah timur berdekatan dengan kampung Sungai Limau. Keberadaan korporasi ini dalam kenyataannya telah mengambil lahan hutan kampung. Dimana menurut keterangan dari Ketua BPD Lahan korporasi tersebut sudah mencapai \pm 200 meter dari jalan BOB, dimana sepengetahuan masyarakat bahwa 1 km dari Jalan BOB merupakan lahan hutan kampung. Dalam kaitan ini, warga Dosan tidak sepakat akan luas lahan yang diklaim oleh perusahaan. Menurut masyarakat, korporasi ini telah mengambil lahan hutan desa yang sejak lama telah mereka rintis. Friksi atau gesekan ini berpotensi munculnya konflik social di tengah masyarakat kampung. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat kampung Dosan dapat bertahan dari desakan-desakan social-ekonomi. Di satu sisi kehidupan Sungai Siak sudah kurang menjanjikan bagi masyarakat DAS Dosan tempatan, disisi lain di wilayah daratan terjadi kapitalisasi sumberdaya alam sedemikian rupa. Dalam kondisi demikian, muncul terobosan dan inovasi pemda kabupaten Siak sebagai antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terutama dalam bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui SK Bupati seperti yang sudah penulis sampaikan diatas. Adapun tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tempatan dengan cara membuat program pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 hektar di kampung Sungai Limau, Dosan, Benayah, Pebaadaran, Dusun Pusaka, Perincit di kecamatan Bunga raya dan kampung teluk Masjid di Kecamatan Sungai Apit. Tanggapan masyarakat tempatan terhadap kebijakan Pemkab Siak ini memang beragam, ada yang menerima, menolak dan ada yang menerima dengan syarat. Kelompok masyarakat yang menerima program, menanggapinya dengan bekerja keras dan berupaya mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pengelolaan perkebunan komoditi kelapa sawit rakyat. Selain itu, ada kelompok masyarakat yang menerima dengan syarat bersikap seakan-akan biasa-biasa saja akan rencana implementasi pembangunan perkebunan kelapa sawit rayat tersebut karena keterbatasan akses informasi dan fasilitas lahan. Kelompok ini menerima apabila manfaat dari pembangunan kebun sawit dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Kemudian ada kelompok masyarakat yang menolak bereaksi melakukan kritik dan sinisme atas pembangunan perkebunan kelapa sawit masyarakat tempatan. Karena memandang program pembangunan kebun sawit ini adalah bentuk lain dari desakan kapitalisasi sumberdaya alam yang sudah lama terjadi di wilayah ini yang dilakukan oleh korporasi-korporasi negara maupun asing. Dalam menghadapi proses perubahan social tersebut yang sama dari setiap kelompok masyarakat tempatan kampung Dosan adalah pertanyaan bagaimana masyarakat tempatan dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang cepat

berubah?¹¹

Gambar 2.



Sumber: Data penelitian,2015

Respon pemerintah (termasuk elit lokal) terhadap perubahan social yang terjadi, di beberapa tempat di Indonesia memang ada bermacam-macam. Di kabupaten Siak (kampong Dosan), Pemda Kabupaten menanggapi dengan bekerja keras dalam melakukan inovasi tata kelola pemerintahan melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit. Menurut beberapa informan, kami berupaya mengikuti tuntutan perubahan. Apabila tidak mau mengikuti tuntutan perubahan, maka akan ketertinggalan zaman. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas, organisasi yang lebih rapi, tata pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan. Dalam kalimat media “nawaitu saya ihklas membangun Siak Sri Indrapura (Azam, No. 839 tahun XVI, 2015:12-13). Dalam menghadapi tantangan itu, pemda kabupaten Siak melakukan langkah-langkah penjangkaran aspirasi untuk menangkap apa yang dipikirkan dan diharapkan warganya dalam hal mengembangkan sektor perkebunan rakyat. Menurut informan hal yang menjadi perhatian itu misalnya ketersediaan lahan, kepemilikan lahan, ketersediaan pupuk dan bibit, lembaga-lembaga mitra berpengalaman mengelola perkebunan kelapa sawit, konsumsi harian petani pekebun dan pelayanan administrasi pertanahan kebun.

Tabel.1

¹¹ Lihat juga Frans Viki Djalong, Melampui Komunalisme: Siasat Perdamaian dalam Politik Pembangunan. CSPA-UGM, Paper 2, Desember 2012. hal.5

Bentu-Bentuk Inovasi Bidang Perkebunan Sawit 2006-2014

Kampung	Sektor Inovasi
Dosan, Benayah, Perincit	Pengadadaan lahan perkebunan
	Anggaran pembangunan
	Mitra kerja Pembangunan
	Infrastruktur ekonomi kampung
	Konsumsi Harian
	Pelayanan Administrasi
	Manajemen konflik

Sumber: data olahan berbagai sumber, 2015

Pelaksanaan program ini di kampung Dosan, mulai pada Tahun 2003. Proses awal observasi tim survey Badan Pertanahan Kabupaten. Setelah adanya sosialisasi I Program sekitar september 2003 yang dihadiri oleh pihak Dari Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Kabupaten Siak. Pihak masyarakat i melakukan pematokan/merintis ulang lahan mereka yang pernah dipakai/dikelola dengan sistem ladang berpindah, hal ini menyebabkan kebanyakan lahan tidak memiliki sertifikat untuk nantinya diukur oleh Badan Pertanahan.

Dalam prosesnya sempat ada beberapa luas lahan yang dipending karena merupakan kebun karet masyarakat, namun dengan pertimbangan karetnya kebanyakan sudah tua ataupun masih kecil (kurang produktif) akhirnya lahan tersebut dimasukkan sebagai Calon Lahan. Sementara lahan yang menjadi mata pencaharian utama tidak diikutsertakan sekitar 40 ha termasuk lahan percontohan kelapa hibrida. Pada umumnya status kepemilikan lahan adalah milik sendiri atau warisan. Diperkirakan *land clearing* berlangsung pada bulan September 2003 yang pelaksanaannya hampir bersamaan dengan desa-desa lainnya dalam Proyek SIAK I. Sedangkan penanaman sudah dimulai sejak awal Tahun 2004 hingga saat sekarang masih berlangsung. Dari sekitar 725 Ha Calon lahan tersebut terdapat \pm 50 ha yang belum selesai ditanam.

Dalam masa sosialisasi program, elit masyarakat Dosan diundang dengan 10 orang untuk perwakilan masing-masing RT, yang pelaksanaannya pertama kali diadakan di Desa Sungai Limau. Sementara pertemuan sosialisasi Program sudah di adakan sebanyak 4 kali. Dan pada saat tersebut diperoleh data bahwa ada 5 KK yang tidak ikut program Sawit Rakyat. Dalam pelaksanaan pembukaan lahan masyarakat dosan ikut serta sekitar 30 orang. Untuk penanaman pada mulanya ditawarkan Rp. 750/batang, hingga berkembang Rp. 1750/ batang saat sekarang dengan kondisi jangkaun penanaman yang lebih jauh. Sementara untuk pekerjaan wedding, pemupukan dihargai Rp.40.000/hektar. Banyak masyarakat yang tidak memilih ikut serta dalam proses tersebut karena mereka menilai upahnya terlalu rendah. Dalam proses penanaman dan pemupukan dari desa sendiri ditunjuk dan digaji oleh Desa satu orang pengawas, yang bertugas mengawasi pelaksanaan penanaman atau pemupukan dan berwenang melakukan koreksi terhadap pekerja. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara berkebun sawit, untuk itu dari keterangan yang didapatkan dari masyarakat

bahwa kemungkinan ada pelatihan dari pihak Pemda atau PTPN V. Selain itu seperti pernyataan dari ketua BPD yang mempunyai pengalaman berkebun sawit di daerah Buatan, selain mengharapkan adanya pelatihan beliau sendiri berniat akan membimbing warga lainnya secara berkelompok dalam merawat/mengelola sawit jika sudah serah terima nantinya. Untuk mengelola kebun sawit akan ditangani oleh koperasi desa. Dan sementara ini koperasi yang berada di Desa Dosan sudah ada. dalam mengelola hasil maupun kebutuhan petani kelapa sawit

2. Kapasitas Politik

Kapasitas politik pemerintah daerah tercermin antara lain dalam upaya melaksanakan terobosan-terobosan kebijakan ekstratif daerah yaitu program-program strategis dalam memelihara dan memobilisasi sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini misalnya Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan sektor perkebunan sebagai salah satu *core bussiness* dan *leading sektor*, selain sektor pariwisata dan industri pengolahan dalam Rencana Pembangunan Panjang daerah (RPJPD) 2005-2025 Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor andalan yang mendukung peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Siak. Dengan demikian, perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Siak terutama kelapa sawit¹². Menurut Informan, selama tahun 2015 telah melakukan tindakan terobosan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang tidak produktif. Hal ini dilakukan karena masyarakat banyak petani khususnya kelapa sawit, tanaman pangan, karet. Pemda kabupaten Siak menyediakan 15 ribu hektar kebun sawit yang harus diremajakan. Tahun 2014 pemerintah daerah kabupaten Siak sudah melakukan peremajaan kebun seluas 1.200 hektar dan berikutnya meremajakan kebun sawit sekitar 13 ribu hektar lagi (Azam, 2015:1213)¹³. Di kampung Dosan, kapasitas ekstratif ini Nampak dari tindakan Pemda Siak dalam membangun “kebun sawit pemda”¹⁴. Calon Lahan kebun sawit mulai dari Program P3KS. Di Desa Dosan Luasnya diperkirakan ± 725 Ha (Sumber Ketua BPD). Yang komposisinya berasal dari lebih dari 600 Ha adalah “belukar tidur” dan sisanya ± 100 Ha karet belukar yang kebanyakan merupakan kebun karet tua (umur 12-15 tahun) dan kebanyakan ditinggal masyarakat karena dinilai tidak produktif yang didukung oleh pola pertanian berpindah. Kondisi tanah Calon Lahan didominasi oleh tanah gambut

¹² Lihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJP) Kabupaten Siak 2005-2025

¹³ Selain itu, disektor tanaman pangan pemda kabupaten Siak berhasil meningkatkan produksi. Tahun 2012, 2013, 2014 atas keberhasilan itu pemda Siak mendapatkan penghargaan dari Presiden republik Indonesia.

¹⁴ Program Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit (P3KS) dikenalnya di tengah masyarakat “kebun sawit Pemda”

tipis dengan kedalaman $\pm 0,5$ - meter. Jarak Calon Kebun dengan rumah Calon Petani diperkirakan berkisar 10 meter sampai 2 Km, dan terletak ± 1 km dari Sungai Siak.

Gambar 3.
Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Siak
Di Kampung Dosan



Sumber: Data lapangan, 2015

Para aktor masyarakat mengetahui Program P3KS sebagai pola kepemilikan lahan dengan sistem kredit. Mereka mengetahui bahwa akan memperoleh kebun seluas 3 H a dari Pemerintah Kabupaten Siak dengan pembayaran secara kredit dipotong 30 % dari hasil kebun mereka nantinya. Untuk lahan/kebun milik masyarakat yang lebih dari 3 hektar kelebihan lahan dinilai Rp. 2.500.000,- / hektar, dengan sistem pemotongan biaya Kebun 3 ha tersebut hingga berbuah pasir (berupa perjanjian lisan). Serah terima akan dilakukan dari PTPN V ke Pemda Siak dan diteruskan kepada Calon Petani setelah kebun sudah siap masa “Pasar Pikul”.¹⁵ Menurut aktor yang mendukung bahwa kebun sawit dapat memberikan mata pencaharian yang lebih prospektif untuk mengangkat taraf hidup mereka. Karena jika bergantung kepada kebun karet sering terkendala dari segi produksi yang terbatas oleh hari hujan.

¹⁵ Riko, LSM, Elang, 2007

Dalam konteks pengaturan pembangunan perkebunan kelapa sawit masyarakat khususnya di kampung Dosan, Pemerintah kabupaten Siak merumuskan berbagai kerangka aturan main terhadap pengelolaan otonomi daerah yang sesuai dengan preferensi lokal misalnya Keputusan Bupati Siak Nomor 171 tanggal 7 Oktober Tahun 2004 tentang pedoman penetapan calon petani CP) dan calon lahan (CL) program P3KS. Kemudian diikuti dengan Keputusan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2006 tentang penetapan petani peserta program pengembangan perkebunan kelapa sawit masyarakat kabupaten Siak. Kebijakan pemerintah ini dapat dijadikan sebagai wujud menggambarkan kapasitas regulative yang menjadi salah satu fungsi dasar pemerintahan sebagai wujud kapasitas pemerintah dalam bertindak.

Kapasitas regulative dalam pengelolaan P3KS memperkuat kelembagaan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi, baik dalam bentuk layanan public, penguatan kapasitas warga (dalam hal ini petani sawit), peningkatan ekonomi masyarakat dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin¹⁶. Keberpihakan itu nampak misalnya dari dibentuknya Koperasi Bina Usaha Tani Utama (KOP.BUTU) melalui Akta pendirian koperasi Surat keputusan Nomor 03/BH/DISKOP/518/I/2004 tanggal 31 Januari 2004. Koperasi ini didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hingga tahun 2012, di kecamatan Pusako sudah berdiri 8 koperasi¹⁷. Menurut informan, koperasi BUTU dengan pengurus baru selama ini sudah mampu meningkatkan asset dan pendapatan petani sawit. Jika sebelumnya rata-rata perpetani memperoleh Rp.2.000.000,-/bulan sekarang ini sudah berubah menjadi rata-rata Rp.5.000.000,- Rp.15.000.000,-/bulan. Perubahan penghasilan ini banyak mewarnai upaya petani sawit dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Selain itu, kapasitas regulative ini dapat sekaligus dijadikan gambaran bagaimana pemerintah daerah kabupaten Siak memberikan tanggapan terhadap perubahan social, aspirasi dan preferensi politik masyarakat. Secara umum kapasitas responsive pemerintahan kabupaten Siak dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Bentuk Inovasi Pemerintah Kabupaten Siak Dalam
Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Tahun 2015¹⁸

Daerah	Sektor Inovasi	Apresiasi
	Upakarya Wanua Nugraha bagi	Kementerian Dalam

¹⁶ Muhtar, 2015:50

¹⁷ Lihat Profil Kecamatan Pusako kabupaten Siak, 2014

¹⁸ Lihat Riau Pos 14 Oktober 2015. keberhasilan pemkab Siak selama kurun empat tahun (2011-2015) meejit naik, takt anggung-tanggung prestasi yang diraih itu mencapai 129 ... baik nasional, regional dan lokal.

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”
Pekanbaru, 17-18 November 2015

Kabupaten Siak	daerah yang berhasil membina Desa	Negeri
	Nilai Standar tertinggi Penyusunan dan pelaporan keuangan Pemda tahun 2014	BPK-RI dan kementerian Keuangan RI
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan manajemen K3	Kementerian Tenaga kerja RI
	Kabupaten layak Anak Kategori Pertama	Presiden RI
	Penghargaan Kebudayaan Nasional kategori	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI
	Pembina BAZNAS Daerah terbaik Nasional	Kementerian Agama RI
	Harapan II Anugrah pangripta Nusantara (APN) Kab/Kota 2015	Menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas RI
	Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA Di daerah	Kementerian Dalam Negeri RI
	Pemkab terbaik se Provinsi Riau dalam Bina Perencanaan Tahun 2015	Gubernur Riau

Sumber: Riau Pos ,14 Oktober 2015;22

Dari data table diatas nampak bahwa Inovasi dan terobosan Pemerintah Kabupaten Siak misalnya ambil contoh tahun 2015 mendapat pengakuan, baik tingkat nasional, regional, dan lokal. Kerja keras dan kemampuan membaca keinginan masyarakat dilakukan Pemerintah mendapat apresiasi. Hal ini layak untuk dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan pertanyaan penelitian yang dirumuskan, penulis dapat menarik kesimpulan studi ini sebagai berikut: analisis diatas menunjukkan bahwa ada banyak isu kebijakan sawit yang muncul kepermukaan namun yang paling menonjol adalah isu perubahan sosial berjalan seiring perebutan kendali kapitalisasi perkebunan. Dalam kondisi demikian dibutuhkan inovasi organisasi pemerintahan daerah sedemikian rupa dengan basis institusi penguatan kapasitas teknokratik dan politik yang dijalankan kepala Daerah. Fakta inilah yang banyak mewarnai perkembangan demokratisasi lokal DAS Siak ke depan. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Viki Djalong.2012.Melampui Komunalisme:Siasat Perdamaian dalam Politik Pembangunan.Monographs on Social Cohesion in North Maluku .Center for Security and Peace Studies UGM.Desember.Paper No.2
- Khairul Anwar,Isril, Wan Asrida.2015. *Political Model of Conflic Based on palm Plantation near to Riverside area:Dosan Siak case,2009-2014* dalam prosiding.Seminar Antar bangsa ke-8 Ekologi manusia dan Perubahan Persekitaran,Langkawi,Kedah Malaysia ,21-22 September 2015:339-345
- Riko Kurniawan,2007.Program Sawit Rakyat,Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau,Pekanbaru
- Irwan Noor.2010.Inovasi Pemerintahan Daerah:Mengapa Gagal? Jurnal Ilmu Politik,Edisi 21:72-92
- Muhtar Haboddin.2015.Merayakan Inovasi.Prosiding Seminar Nasional.Malang.APSIPI:48-59.
- Sunyoto Usman.2015.Esai-Esai Perubahan Sosial.Yogyakarta.Pustaka pelajar
- Priyatmoko.2002.Peningkatan Kinerja Ekskutif dan Implementasi Otonomi Daerah.Jurnal Ilmu Politik No.IX:56-62
- Keputusan Bupati Siak Nomor 171 tanggal 7 Oktober Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Calon Petani CP) dan Calon Lahan (CL) Program P3KS.

Keputusan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2006 Tentang Penetapan Petani Peserta Program

Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Kabupaten Siak.

Lihat Riau Pos, 12 Oktober 2015

Lihat Riau Pos, 14 Oktober 2015

Azam.laporan Utama.No.839 Tahun XVI/21-27 April 2015